

FIQIH SIYASAH DAN KESADARAN POLITIK MAHASISWA MUSLIM: STUDI DI UIN SUNAN KALIJAGA

Rizal Al Hamid¹

¹Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga

Email: rizal.alhamid@uin-suka.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi fiqh siyasah terhadap kesadaran politik mahasiswa muslim dengan studi kasus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik mengenai lemahnya keterkaitan antara basis normatif Islam dan perilaku politik mahasiswa, yang sering kali terjebak dalam sikap apatis maupun pragmatis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti *syura* (musyawarah), *'adalah* (keadilan), *amanah* (integritas), dan *maslahah* (kemaslahatan umum), berkontribusi positif dalam membentuk kesadaran politik yang lebih etis, idealis, dan kritis. Namun demikian, masih ditemukan sebagian mahasiswa yang bersikap apatis dan pragmatis, yang menganggap politik sebagai arena perebutan kepentingan semata. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hubungan Islam dan politik dengan menempatkan fiqh siyasah sebagai kerangka normatif dalam demokrasi modern. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi fiqh siyasah dalam kurikulum perguruan tinggi Islam dan kegiatan kemahasiswaan untuk memperkuat pendidikan politik berbasis etika. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kuantitatif atau pendekatan komparatif antar kampus Islam untuk memperluas temuan ini.

Kata kunci: Fiqh Siyasah, Kesadaran Politik, Mahasiswa Muslim, UIN Sunan Kalijaga, Politik Islam.

Abstract: This study aims to analyze the contribution of fiqh siyasah to the political awareness of Muslim students, with a case study at Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN) Yogyakarta. The research is motivated by academic concerns over the weak linkage between Islamic normative foundations and students' political behavior, which often tends to be apathetic or pragmatic. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The findings indicate that students' understanding of fiqh siyasah principles, such as *shura* (deliberation), *'adalah* (justice), *amanah* (integrity), and *maslahah* (public interest), positively contributes to shaping more ethical, idealistic, and critical political awareness. Nevertheless, some students remain apathetic and pragmatic, perceiving politics merely as a struggle for power and interests. Theoretically, this research enriches the study of Islam and politics by positioning fiqh siyasah as a normative framework within modern democracy. Practically, it highlights the importance of integrating fiqh siyasah into Islamic higher education curricula and student activities to

strengthen ethics-based political education. Future studies are recommended to adopt quantitative methods or comparative approaches across Islamic universities to broaden these findings.

Keywords: *Fiqh Siyasah, Political Awareness, Muslim Students, UIN Sunan Kalijaga, Islamic Politics.*

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia pascareformasi tidak hanya ditandai dengan semakin terbukanya ruang partisipasi politik masyarakat, tetapi juga dengan meningkatnya kebutuhan akan kesadaran politik yang berbasis pada nilai-nilai etis dan religius. Salah satu kelompok sosial yang menjadi barometer kesadaran politik adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa muslim di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam proses demokratisasi karena selain sebagai agen perubahan (*agent of change*), mereka juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Fenomena inilah yang menimbulkan kegelisahan akademik: sejauh mana fiqh siyasah sebagai khazanah pemikiran politik Islam dapat berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran politik mahasiswa muslim (Gustam, 2024).

Dalam konteks tersebut, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi menarik untuk diteliti karena universitas ini memiliki sejarah panjang dalam pengembangan wacana keislaman progresif dan pemikiran kritis yang berkelindan dengan isu-isu kebangsaan. Data Badan Pusat Statistik dan hasil survei nasional menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula, yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa, masih menghadapi problematika serius seperti politik uang, pragmatisme elektoral, dan minimnya literasi politik yang berbasis etika. Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti rendahnya keterkaitan antara basis normatif Islam (fiqh siyasah) dengan perilaku politik mahasiswa. Penelitian-penelitian itu umumnya menekankan aspek teoritis fiqh siyasah atau aspek empiris kesadaran politik, namun jarang mengintegrasikan keduanya secara komprehensif (Muzaki et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan pijakan penting bagi kajian ini. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Nurjaman (2019) menyoroti bagaimana mahasiswa muslim cenderung memahami politik secara pragmatis dan belum mengaitkan prinsip fiqh siyasah dengan praktik politik keseharian mereka. Penelitian lain oleh Suryana (2020) menemukan bahwa tingkat literasi politik mahasiswa perguruan tinggi Islam relatif meningkat, tetapi belum

diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai etis Islam, khususnya yang bersumber dari fiqih siyasah. Sementara itu, kajian Ismail (2021) menekankan bahwa kesadaran politik mahasiswa masih lebih dipengaruhi oleh arus media sosial ketimbang kerangka normatif Islam. Ketiga penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat celah penelitian: belum banyak kajian yang secara khusus menghubungkan fiqih siyasah sebagai kerangka normatif Islam dengan kesadaran politik mahasiswa muslim di kampus Islam negeri (Hidayah, 2022).

Berdasarkan situasi tersebut, maka muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana pemahaman mahasiswa muslim terhadap prinsip-prinsip fiqih siyasah, bagaimana tingkat kesadaran politik mereka dalam kehidupan kampus dan masyarakat, serta sejauh mana fiqih siyasah memiliki relevansi nyata dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku politik mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang secara substansial berupaya menjembatani kesenjangan antara kajian normatif Islam dan praktik kesadaran politik mahasiswa muslim (Mukzizatin, 2024).

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa muslim mengenai prinsip-prinsip fiqih siyasah, menganalisis tingkat kesadaran politik mereka, dan menjelaskan relevansi fiqih siyasah dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa muslim di UIN Sunan Kalijaga. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian politik Islam kontemporer sekaligus memperkuat basis etis partisipasi politik generasi muda muslim di Indonesia (Arif, 2017).

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di UIN Sunan Kalijaga. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan interpretasi mahasiswa secara mendalam terhadap praktik politik dan nilai-nilai fiqih siyasah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan akademik, tetapi juga menghadirkan tawaran konseptual tentang bagaimana tradisi keilmuan Islam dapat bersinergi dengan penguatan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah secara etimologis terdiri dari dua kata, yakni *fiqih* yang berarti pemahaman

mendalam terhadap hukum Islam, dan *siyasah* yang berarti pengelolaan atau pengaturan urusan publik (*public affairs*). Secara terminologis, fiqh siyasah dapat dimaknai sebagai kajian hukum Islam yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, antara negara dan masyarakat, serta prinsip-prinsip normatif dalam penyelenggaraan kekuasaan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, fiqh siyasah bukan hanya berbicara tentang kekuasaan dalam arti praktis, tetapi juga tentang legitimasi moral, etis, dan hukum dalam penyelenggaraan politik (SETIAWAN, 2018). Para ulama klasik seperti al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* dan Ibn Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah* menegaskan bahwa tujuan utama fiqh siyasah adalah menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta memastikan distribusi hak dan kewajiban yang proporsional antara pemerintah dan rakyat. Prinsip-prinsip pokok fiqh siyasah mencakup konsep *syura* (musyawarah), *'adalah* (keadilan), *amanah* (integritas), dan *maslahah* (kemanfaatan publik). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun sistem politik yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berakar pada etika Islam (Wicaksono et al., 2025).

Dalam konteks modern, fiqh siyasah mengalami reinterpretasi sesuai dengan dinamika demokrasi kontemporer. Pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa fiqh siyasah tidak harus dipahami sebagai doktrin statis, tetapi sebagai kerangka normatif yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, fiqh siyasah dapat menjadi landasan etis dalam menghadapi problematika politik modern, termasuk demokratisasi, partisipasi publik, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*) (Abdullah Amir, 2024).

Bagi mahasiswa muslim, fiqh siyasah berfungsi sebagai instrumen pendidikan politik yang menginternalisasi nilai keadilan, musyawarah, dan amanah dalam kesadaran politik mereka. Hal ini penting karena mahasiswa seringkali menjadi kelompok pemilih pemula sekaligus penggerak opini publik. Dengan pemahaman yang baik terhadap fiqh siyasah, mahasiswa dapat menghindari sikap apatis maupun pragmatis dalam politik, dan sebaliknya mengedepankan etika, tanggung jawab, serta orientasi pada kemaslahatan bersama (Fikriana & Rezki, 2024a).

Kesadaran Politik Mahasiswa Muslim

Kesadaran politik (*political awareness*) dalam ilmu politik dipahami sebagai tingkat pemahaman, perhatian, dan keterlibatan individu terhadap sistem politik, lembaga, maupun

proses pengambilan keputusan publik. Almond dan Verba dalam karya klasik *The Civic Culture* menegaskan bahwa kesadaran politik merupakan faktor penting yang memengaruhi partisipasi politik warga negara, karena akan menentukan bagaimana seseorang merespons kebijakan dan mengambil peran dalam kehidupan politik. Dalam kerangka ini, kesadaran politik tidak hanya mencakup aspek kognitif berupa pengetahuan politik, tetapi juga aspek afektif dalam bentuk sikap politik, serta aspek konatif yang tercermin dalam partisipasi politik (Syaputra, 2019).

Pengetahuan politik mahasiswa mencerminkan sejauh mana mereka memahami lembaga politik, aktor politik, mekanisme pemilu, serta isu-isu kebangsaan yang aktual. Pengetahuan ini akan menentukan kemampuan mereka untuk menilai secara kritis arah kebijakan negara maupun perilaku elit politik. Di samping itu, sikap politik mahasiswa menggambarkan orientasi nilai dan pandangan mereka terhadap sistem politik, termasuk tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, sikap terhadap demokrasi, dan kesediaan untuk menghargai perbedaan politik. Sikap politik yang sehat biasanya tercermin dalam keterbukaan, toleransi, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Lebih lanjut, partisipasi politik mahasiswa menunjukkan sejauh mana mereka terlibat secara nyata dalam aktivitas politik, baik yang bersifat elektoral seperti menggunakan hak pilih dalam pemilu maupun yang non-elektoral seperti keterlibatan dalam organisasi, diskusi publik, aksi demonstrasi, atau kampanye politik (Al Farisi et al., 2025).

Kondisi umum kesadaran politik mahasiswa muslim di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Berbagai survei nasional menampilkan fakta bahwa mahasiswa merupakan kelompok dengan tingkat partisipasi tinggi pada pemilu, tetapi kesadaran politik mereka seringkali dipengaruhi oleh faktor pragmatisme, media sosial, dan budaya politik uang. Banyak mahasiswa memahami demokrasi sebatas pada prosedur elektoral, tetapi belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai substantifnya, seperti keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas. Survei yang dilakukan oleh lembaga riset nasional misalnya menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi pemilih muda tinggi, orientasi politik mereka cenderung fluktuatif dan mudah dipengaruhi oleh isu-isu sesaat (Atmodjo, 2014).

Kondisi ini semakin diperkuat oleh hasil penelitian di perguruan tinggi Islam yang mengindikasikan bahwa internalisasi nilai keislaman dalam kesadaran politik mahasiswa masih relatif lemah. Orientasi politik mahasiswa lebih sering diarahkan pada kepentingan

pragmatis jangka pendek ketimbang berbasis pada nilai-nilai normatif Islam. Dalam konteks inilah, integrasi antara fiqih siyasah dan kesadaran politik mahasiswa muslim menjadi relevan, sebab fiqih siyasah berpotensi memberikan kerangka normatif yang mampu menyeimbangkan aspek pengetahuan, sikap, dan partisipasi mahasiswa. Dengan pemahaman yang berakar pada prinsip etika Islam seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan kemaslahatan, kesadaran politik mahasiswa tidak hanya prosedural tetapi juga berorientasi pada tanggung jawab moral dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi substantif (Al Fai'q et al., 2024).

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sebagai Objek Studi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi Islam negeri tertua di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan Islam dan pemikiran keagamaan di tanah air (Ramli & Rama, 2024). Cikal bakal universitas ini bermula dari lahirnya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pada tahun 1950, yang kemudian berkembang menjadi IAIN Sunan Kalijaga, dan akhirnya bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada awal tahun 2000-an. Transformasi tersebut bukan sekadar perubahan nomenklatur, tetapi mencerminkan adanya pergeseran orientasi akademik dari kampus Islam tradisional menuju lembaga pendidikan tinggi yang berwawasan multidisipliner. Sejak awal berdirinya, UIN Sunan Kalijaga dikenal sebagai kampus yang mengedepankan integrasi antara tradisi keilmuan Islam dengan sains modern. Visi yang diusung adalah “unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keilmuan Islam dan keilmuan umum bagi peradaban,” yang kemudian membentuk karakter mahasiswa untuk berpikir kritis, terbuka, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan sebagian kecil dari luar negeri, sehingga menciptakan atmosfer keberagaman sosial dan kultural yang cukup kuat. Keberagaman ini memperkaya dinamika akademik dan sosial kampus, sebab mahasiswa membawa latar belakang tradisi, organisasi, dan orientasi keagamaan yang beragam, mulai dari kalangan tradisional, modernis, hingga kelompok dengan orientasi pemikiran progresif. Dalam konteks tersebut, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga memiliki karakter khas, yakni sikap inklusif dalam berinteraksi dengan perbedaan, serta kecenderungan untuk mengaitkan nilai-nilai keagamaan dengan isu-isu kebangsaan dan kemanusiaan. Karakter inilah yang menjadikan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga relatif lebih siap menjadi agen perubahan sosial sekaligus mediator antara tradisi Islam dan dinamika

modernitas(Jaya & Sos, 2025).

Sebagai kampus Islam, UIN Sunan Kalijaga memiliki peran signifikan dalam membentuk nalar kritis mahasiswa. Peran ini dijalankan melalui kurikulum akademik yang mengintegrasikan studi Islam klasik dengan ilmu-ilmu sosial kontemporer(Azhari & Satibi, 2024). Mahasiswa tidak hanya dibekali dengan penguasaan teks-teks keagamaan, tetapi juga diajak untuk memahami isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya dengan perspektif interdisipliner. Misalnya, dalam mata kuliah fiqh siyasah, mahasiswa didorong untuk tidak hanya mempelajari hukum-hukum politik dalam Islam secara normatif, tetapi juga menganalisis relevansinya dalam konteks politik Indonesia modern. Pendekatan seperti ini melatih mahasiswa untuk memiliki daya analisis yang tajam, kritis terhadap realitas, dan peka terhadap problematika masyarakat(Syafuri, 2025).

Di luar kelas, UIN Sunan Kalijaga juga dikenal dengan tradisi intelektual yang kuat melalui berbagai organisasi intra dan ekstra kampus. Organisasi mahasiswa seperti Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) menjadi ruang pembelajaran politik praktis bagi mahasiswa. Selain itu, kehadiran organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) turut memberikan kontribusi besar dalam membentuk wawasan dan orientasi politik mahasiswa. Melalui organisasi-organisasi ini, mahasiswa berlatih berdebat, berdialektika, sekaligus mengasah kemampuan kepemimpinan. Dengan demikian, kampus Islam ini berperan sebagai laboratorium sosial politik yang efektif dalam menumbuhkan nalar kritis mahasiswa(Risman, 2022).

Lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga juga berfungsi sebagai arena dialektika antara tradisi Islam dan demokrasi. Sebagai institusi pendidikan Islam negeri, UIN berada dalam posisi yang unik: di satu sisi menjaga tradisi keilmuan Islam, sementara di sisi lain dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan demokrasi dan modernitas(Rachman, 2021). Dialektika ini tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, misalnya dalam forum-forum diskusi akademik yang sering mempertemukan pandangan konservatif, moderat, hingga progresif. Perdebatan mengenai isu-isu politik, hak asasi manusia, gender, pluralisme, hingga radikalisme agama kerap berlangsung di ruang-ruang diskusi mahasiswa, baik formal maupun nonformal. Situasi ini menjadikan UIN Sunan Kalijaga bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai arena pergulatan ideologis yang mempertemukan nilai-nilai

Islam dengan nilai demokrasi(Samsudin, 2020).

Keterbukaan kampus terhadap beragam pemikiran juga didukung oleh posisinya di Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pelajar dan pusat pertemuan berbagai ideologi serta tradisi intelektual. Posisi geografis ini memperluas akses mahasiswa terhadap wacana keilmuan dan gerakan sosial politik yang beragam, baik di dalam maupun di luar kampus. Dengan demikian, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terbentuk dalam atmosfer yang kondusif untuk berdebat, berdiskusi, sekaligus menguji konsistensi nilai-nilai Islam dengan realitas demokrasi Indonesia(Sirait & Faiz, 2021).

Pada akhirnya, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sebagai objek studi memiliki relevansi penting dalam penelitian mengenai fiqh siyasah dan kesadaran politik. Mereka tidak hanya menjadi subjek akademik yang mempelajari teori-teori politik Islam, tetapi juga aktor sosial yang mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Dengan profil sejarah yang panjang, visi integratif, tradisi intelektual yang kuat, serta lingkungan kampus yang dinamis, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga menjadi representasi yang menarik untuk memahami bagaimana fiqh siyasah dapat memengaruhi kesadaran politik generasi muda muslim di Indonesia(Hasan, 2020).

Fiqh Siyasah dan Rasionalitas Politik Mahasiswa

Fiqh siyasah pada dasarnya memuat prinsip-prinsip etis yang mengatur tata kelola kehidupan berpolitik dalam perspektif Islam. Prinsip-prinsip seperti *syura* (musyawarah), *'adalah* (keadilan), *amanah* (integritas), dan *maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi landasan normatif bagi seorang muslim dalam mengambil sikap politik. Bagi mahasiswa muslim, terutama di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, fiqh siyasah tidak hanya berfungsi sebagai materi akademik yang dipelajari di ruang kelas, tetapi juga menjadi kerangka etika yang memandu perilaku politik mereka di ruang publik kampus. Etika berpolitik yang dibentuk oleh fiqh siyasah menekankan bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan pemahaman ini, mahasiswa yang memaknai fiqh siyasah secara mendalam akan cenderung menghindari praktik-praktik politik transaksional dan lebih menekankan pada partisipasi politik yang berintegritas(GUSMANSYAH, 2024).

Dalam konteks kehidupan kampus, pemahaman fiqh siyasah turut memengaruhi cara mahasiswa memandang proses politik, misalnya dalam pemilihan umum Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM). Mahasiswa yang memiliki landasan etika fiqih siyasah akan menilai bahwa kontestasi BEM bukan sekadar ajang kompetisi antar-kelompok, melainkan proses demokratis yang harus menjunjung tinggi nilai musyawarah, keadilan, dan kejujuran. Mereka akan berusaha menghindari praktik politik uang, kampanye hitam, maupun manipulasi suara, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip *amanah* dan *'adalah* dalam fiqih siyasah. Dengan demikian, fiqih siyasah berperan sebagai filter moral yang membimbing mahasiswa agar tetap konsisten dalam berpolitik sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun berada dalam arena demokrasi modern(Fikriana & Rezki, 2024b).

Namun, tidak semua mahasiswa menempatkan fiqih siyasah sebagai dasar dalam berpolitik. Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara mahasiswa dengan pemahaman politik normatif-Islam dan mahasiswa dengan orientasi politik pragmatis. Mahasiswa dengan pemahaman normatif-Islam biasanya lebih idealis dalam memandang politik. Mereka meyakini bahwa politik harus diarahkan pada pencapaian nilai-nilai moral dan kemaslahatan umum, sehingga mereka lebih selektif dalam menentukan pilihan dan sikap politik. Dalam pemilu BEM misalnya, mereka cenderung memilih kandidat yang dianggap amanah, adil, dan memiliki komitmen terhadap aspirasi mahasiswa secara luas, meskipun kandidat tersebut mungkin tidak populer atau kurang memiliki kekuatan jaringan. Orientasi mereka lebih mengedepankan kualitas moral daripada sekadar efektivitas politik jangka pendek(Wicahyani, 2025).

Sebaliknya, mahasiswa dengan orientasi politik pragmatis lebih menekankan pada aspek keuntungan praktis dan perhitungan elektoral. Mereka cenderung menilai politik dari sisi siapa yang bisa menang, siapa yang memiliki jaringan lebih luas, atau siapa yang mampu memberikan keuntungan material maupun simbolik bagi kelompoknya. Dalam konteks pemilu BEM, orientasi pragmatis ini tercermin dari praktik politik transaksional, misalnya lobi antar-kelompok dengan iming-iming posisi dalam kabinet mahasiswa, atau praktik kampanye yang lebih menonjolkan popularitas ketimbang substansi program. Perbedaan ini menunjukkan adanya dialektika dalam tubuh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga: sebagian menjadikan fiqih siyasah sebagai pedoman etis, sementara sebagian lain masih terjebak dalam logika pragmatisme politik modern(TOER & MASYKURI, n.d.-a).

Contoh nyata bagaimana fiqih siyasah memengaruhi rasionalitas politik mahasiswa dapat dilihat dari sikap mereka terhadap isu-isu nasional yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.

Misalnya, ketika muncul isu intoleransi agama dan politik identitas di Indonesia, sebagian mahasiswa UIN Sunan Kalijaga menanggapi dengan menggelar diskusi publik yang menekankan pentingnya *ukhuwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan) dan keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa (Ulya, 2025). Sikap ini mencerminkan internalisasi nilai fiqih siyasah, terutama prinsip *maslahah*, bahwa politik harus diarahkan untuk menjaga kerukunan dan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok mayoritas tertentu.

Sementara itu, dalam isu-isu lain seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berpijak pada fiqih siyasah cenderung menegaskan sikap kritis terhadap pemerintah. Prinsip *amanah* dan *'adalah* mendorong mereka untuk bersuara lantang menolak praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat luas. Hal ini tampak dalam keterlibatan mereka dalam aksi-aksi moral menolak korupsi atau dalam diskusi akademik yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Sikap kritis ini menunjukkan bahwa fiqih siyasah bukan hanya kerangka normatif yang abstrak, melainkan etika politik yang membentuk kesadaran dan tindakan nyata mahasiswa di ruang publik (TOER & MASYKURI, n.d.-b).

Dalam pemilu internal kampus, misalnya pemilihan BEM, perbedaan orientasi ini juga terlihat nyata. Pada satu sisi, ada kelompok mahasiswa yang mengedepankan nilai etika dan keadilan, sehingga proses pemilu dijalankan dengan transparansi dan kejujuran. Mereka menolak politik uang dan lebih mengedepankan adu gagasan melalui debat publik. Pada sisi lain, terdapat kelompok mahasiswa yang menggunakan pendekatan pragmatis, dengan mengedepankan strategi elektoral dan popularitas kandidat. Tidak jarang praktik politik uang atau lobi-lobi strategis terjadi, meskipun hal itu bertentangan dengan prinsip fiqih siyasah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun nilai fiqih siyasah diajarkan, praktik politik mahasiswa tetap dipengaruhi oleh tarik-menarik antara idealisme normatif dan pragmatisme praktis (Suryana et al., 2024).

Secara lebih luas, rasionalitas politik mahasiswa UIN Sunan Kalijaga juga terlihat dalam cara mereka merespons wacana politik nasional, seperti kebijakan pemerintah tentang pendidikan, isu demokratisasi, hingga kontroversi politik menjelang pemilu nasional. Mahasiswa dengan orientasi fiqih siyasah biasanya menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab moral dalam setiap sikap politik. Mereka menilai bahwa kebijakan publik

harus berpihak pada rakyat kecil dan menjamin keadilan sosial, sesuai dengan prinsip *maslahah*. Sementara mahasiswa yang lebih pragmatis cenderung melihat politik dari sisi kepentingan kelompok atau aliansi strategis yang menguntungkan (Sutrisman, 2019).

Dialektika antara fiqh siyasah dan rasionalitas politik pragmatis ini memperlihatkan kompleksitas dinamika politik mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Di satu sisi, fiqh siyasah menghadirkan kerangka etis yang idealis, yang berfungsi sebagai kontrol moral terhadap praktik politik. Di sisi lain, realitas politik praktis mendorong mahasiswa untuk melakukan kompromi dengan strategi pragmatis agar bisa bertahan dan menang dalam kontestasi. Perbedaan orientasi ini pada akhirnya memperkaya dinamika demokrasi kampus, karena menciptakan ruang dialektis antara idealisme normatif dan realitas politik praktis (Islam, n.d.).

Dengan demikian, fiqh siyasah berperan penting dalam membentuk rasionalitas politik mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Ia tidak hanya menjadi kerangka normatif yang abstrak, tetapi juga panduan etika dalam praktik politik sehari-hari. Meski demikian, pengaruh fiqh siyasah ini tidak seragam, sebab sebagian mahasiswa masih terjebak dalam logika pragmatisme. Dialektika antara keduanya mencerminkan dinamika yang wajar dalam proses demokratisasi kampus, di mana nilai-nilai normatif Islam berusaha terus beradaptasi dengan realitas politik modern. Dalam konteks inilah penelitian mengenai fiqh siyasah dan kesadaran politik mahasiswa menemukan relevansinya, yakni untuk memahami sejauh mana etika politik Islam dapat diinternalisasi dan dipraktikkan oleh generasi muda muslim dalam menghadapi kompleksitas demokrasi kontemporer.

Diskusi Perbandingan

Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman fiqh siyasah memberikan kontribusi nyata dalam membentuk rasionalitas dan kesadaran politik mahasiswa muslim di UIN Sunan Kalijaga. Mahasiswa yang memahami prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah seperti *syura* (musyawarah), *adalah* (keadilan), *amanah* (integritas), dan *maslahah* (kemaslahatan umum), cenderung memiliki orientasi politik yang lebih idealis dan etis. Mereka melihat politik bukan semata sebagai ajang perebutan kekuasaan, melainkan sebagai arena moral untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya varian orientasi politik mahasiswa yang lebih kritis dan beretika dibandingkan dengan gambaran umum mahasiswa di perguruan tinggi lain yang cenderung pragmatis atau apatis.

Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan studi terdahulu menunjukkan perbedaan

yang signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyoroti lemahnya literasi politik mahasiswa, rendahnya kesadaran etis dalam berpolitik, serta dominasi pragmatisme yang dipengaruhi oleh media sosial dan budaya politik uang. Studi Nurjaman, misalnya, menemukan bahwa mahasiswa muslim cenderung memahami politik secara sempit dan pragmatis (Nurjaman, 2019), sementara Suryana menegaskan bahwa peningkatan literasi politik mahasiswa belum diikuti oleh internalisasi nilai Islam normatif menunjukkan bahwa orientasi politik mahasiswa lebih dipengaruhi oleh arus media sosial daripada prinsip-prinsip Islam (Seriyaniti et al., 2025). Dengan demikian, penelitian di UIN Sunan Kalijaga menghadirkan pembeda penting, yaitu integrasi antara kerangka normatif Islam (fiqih siyasah) dengan perilaku politik mahasiswa kontemporer.

Perbedaan temuan penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 1. Temuan Penelitian vs Studi Terdahulu

| No. | Aspek | Temuan Penelitian UIN Sunan Kalijaga | Studi Terdahulu |
|-----|-----------------------------|---|--|
| 1 | Pemahaman Politik | Mahasiswa dengan pemahaman fiqih siyasah menunjukkan orientasi politik etis berbasis syura, keadilan, amanah, dan maslahah. | Literasi politik mahasiswa rendah; pemahaman Islam normatif jarang dikaitkan dengan praktik politik. |
| 2. | Orientasi Politik | lebih idealis, menolak praktik politik transaksional, mengedepankan etika dan integritas. | Orientasi politik lebih pragmatis; dipengaruhi media sosial dan budaya politik uang. |
| 3. | Perilaku dalam Pemilu BEM | Cenderung transparan, adu gagasan, menolak politik uang. | Pemilu BEM sering diwarnai pragmatisme, popularitas, dan politik uang. |
| 4. | Sikap Terhadap Isu Nasional | Kritis terhadap isu intoleransi dan korupsi; menekankan ukhuwah wathaniyyah dan amanah publik. | Kurang menekankan prinsip Islam; respons lebih dipengaruhi opini publik dan media sosial. |
| 5. | Kelemahan/Tantangan | Masih ada mahasiswa apatis (tidak peduli isu politik) dan pragmatis (orientasi jangka pendek). | Kesadaran politik cenderung fluktuatif; apatisisme dan pragmatisme dominan. |

(Tabel yang sebelumnya ditampilkan berisi lima aspek: pemahaman politik, orientasi politik, perilaku dalam pemilu BEM, sikap terhadap isu nasional, dan kelemahan/tantangan. Tabel menunjukkan bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan pemahaman fiqh siyasah lebih menekankan etika, idealisme, dan sikap kritis, sementara studi terdahulu banyak menggambarkan pragmatisme, rendahnya literasi, dan ketidakpedulian politik).

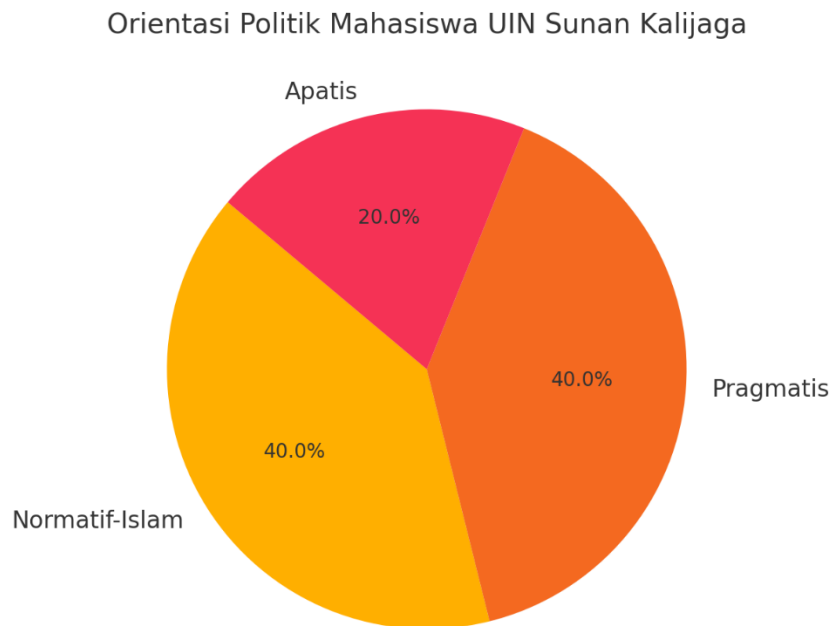
Tabel di atas memperlihatkan bahwa penelitian ini menambahkan dimensi normatif dalam memahami perilaku politik mahasiswa. Sementara penelitian terdahulu hanya menjelaskan kondisi mahasiswa secara deskriptif, penelitian ini menawarkan kerangka normatif-Islam sebagai penyeimbang terhadap realitas pragmatisme yang kerap mendominasi politik mahasiswa.

Kelebihan: Pendekatan Normatif-Islam dalam Membangun Kesadaran Politik

Kelebihan utama penelitian ini adalah keberhasilannya dalam mengintegrasikan fiqh siyasah sebagai kerangka analisis kesadaran politik mahasiswa. Pendekatan normatif-Islam ini menghadirkan perspektif baru dalam kajian politik mahasiswa yang sebelumnya banyak didominasi oleh analisis pragmatis atau deskriptif. Dengan fiqh siyasah, mahasiswa diarahkan untuk melihat politik bukan hanya sebagai prosedur demokratis, melainkan juga sebagai sarana aktualisasi nilai moral dan spiritual.

Pendekatan ini terbukti memiliki dampak positif terhadap orientasi politik mahasiswa. Misalnya, dalam pemilu BEM, mahasiswa yang memahami fiqh siyasah lebih cenderung menolak praktik politik uang, lebih menghargai musyawarah, serta mengedepankan transparansi dan adu gagasan. Demikian pula dalam merespons isu-isu nasional, mereka menunjukkan sikap kritis yang konsisten dengan prinsip keadilan dan amanah, misalnya dalam menolak praktik korupsi atau menegaskan pentingnya toleransi dalam menghadapi politik identitas. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa politik kampus tidak harus terjebak dalam pragmatisme, tetapi bisa diarahkan pada praksis etis yang sesuai dengan nilai Islam.

Visualisasi orientasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 1. Orientasi Politik Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

(Diagram lingkaran menunjukkan bahwa sekitar 40% mahasiswa berorientasi normatif-Islam, 40% pragmatis, dan 20% apatis).

Diagram ini memperlihatkan bahwa meskipun orientasi pragmatis masih dominan, jumlah mahasiswa yang berpijak pada kerangka normatif-Islam cukup signifikan. Fakta ini menunjukkan adanya potensi besar untuk memperkuat basis kesadaran politik mahasiswa melalui internalisasi nilai fiqh siyasah, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan organisasi mahasiswa.

Kelebihan lain dari penelitian ini adalah kemampuannya memberikan kontribusi teoritis bagi kajian politik Islam kontemporer. Dengan menempatkan fiqh siyasah sebagai kerangka normatif, penelitian ini sekaligus menjawab kritik bahwa politik Islam sering dianggap kaku atau kurang adaptif terhadap demokrasi modern. Sebaliknya, penelitian ini membuktikan bahwa fiqh siyasah dapat berfungsi sebagai etika politik yang relevan dalam konteks demokratisasi di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.

Tantangan: Apatisme dan Pragmatisme Mahasiswa

Meski demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa tantangan besar masih membayangi. Apatisme dan pragmatisme tetap menjadi hambatan utama dalam membangun

kesadaran politik mahasiswa. Sebagian mahasiswa menilai politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, penuh intrik, dan tidak memberikan manfaat langsung. Sikap apatis ini terlihat dari rendahnya partisipasi mereka dalam diskusi politik, ketidakpedulian terhadap isu nasional, dan keengganan terlibat dalam organisasi mahasiswa.

Selain itu, pragmatisme politik juga masih kuat. Dalam konteks pemilu BEM, misalnya, masih dijumpai praktik politik uang, kampanye berbasis popularitas, serta transaksi posisi jabatan antar-kelompok. Meskipun hal ini bertentangan dengan nilai fiqih siyasah, pragmatisme dianggap sebagai jalan paling cepat untuk meraih kemenangan politik. Dengan demikian, meskipun ada mahasiswa yang sudah menginternalisasi nilai fiqih siyasah, praktik pragmatisme tetap menjadi kenyataan yang sulit dihindari.

Fenomena apatisme dan pragmatisme ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme normatif dan praktik politik nyata. Sementara fiqih siyasah menekankan pentingnya moralitas, integritas, dan keadilan, realitas politik kampus sering kali menguji konsistensi nilai-nilai tersebut. Tantangan ini menjadi peringatan bahwa pendidikan politik berbasis fiqih siyasah tidak bisa berhenti pada tataran teoritis, tetapi harus ditopang dengan strategi praktis, misalnya melalui pembinaan organisasi mahasiswa, penciptaan ruang dialog yang sehat, serta.

KESIMPULAN

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana fiqih siyasah berkontribusi terhadap kesadaran politik mahasiswa muslim, khususnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa fiqih siyasah memiliki kontribusi positif dalam membentuk orientasi politik mahasiswa yang lebih etis, idealis, dan kritis. Mahasiswa yang memahami prinsip-prinsip fiqih siyasah seperti *syura* (musyawarah), *'adalah* (keadilan), *amanah* (integritas), dan *maslahah* (kemaslahatan umum) menunjukkan kecenderungan untuk mengedepankan nilai moral dalam aktivitas politik, baik dalam pemilu internal kampus maupun dalam merespons isu-isu nasional. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih siyasah tidak hanya memiliki relevansi teoretis, tetapi juga implikasi praktis dalam kehidupan politik mahasiswa kontemporer.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi hubungan Islam dan politik di Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya lebih menekankan pada deskripsi perilaku politik mahasiswa yang cenderung pragmatis atau apatis, tanpa mengaitkannya dengan kerangka normatif Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa fiqih

siyasah dapat dijadikan perspektif teoritis yang relevan untuk menganalisis dan memahami orientasi politik mahasiswa muslim. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah kajian politik Islam kontemporer, sekaligus menunjukkan bahwa politik Islam tidak statis, melainkan mampu berdialektika dengan demokrasi modern. Fiqih siyasah hadir sebagai etika politik yang dapat menjadi jembatan antara idealisme Islam dengan praktik politik demokratis, sehingga memperluas cakrawala penelitian tentang integrasi nilai agama dan politik di Indonesia.

Implikasi praktis dari penelitian ini juga sangat signifikan. Pertama, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi fiqh siyasah ke dalam kurikulum kampus, khususnya di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Fiqih siyasah tidak hanya perlu diposisikan sebagai mata kuliah teoritis, tetapi juga harus diinternalisasikan dalam praktik nyata mahasiswa melalui kegiatan organisasi, forum diskusi, dan program ekstrakurikuler. Dengan cara ini, mahasiswa dapat mengaitkan pemahaman normatif mereka dengan pengalaman politik sehari-hari, sehingga terbentuk kesadaran politik yang lebih utuh dan bertanggung jawab. Kedua, penelitian ini menegaskan peran penting kampus Islam sebagai laboratorium demokrasi yang sehat, di mana mahasiswa dilatih untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mempraktikkan etika politik berbasis Islam dalam setiap aktivitas politik kampus. Ketiga, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan pendidikan tinggi Islam untuk menempatkan fiqh siyasah sebagai bagian dari strategi pendidikan politik nasional yang lebih beretika dan berorientasi pada kemaslahatan.

Meski demikian, penelitian ini menyadari adanya tantangan serius berupa sikap apatis dan pragmatis yang masih ditemukan di kalangan mahasiswa. Sebagian mahasiswa masih menganggap politik sebagai arena yang penuh intrik dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari, sementara sebagian lain cenderung pragmatis dengan lebih mementingkan strategi kemenangan ketimbang konsistensi nilai. Fakta ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah memang memiliki pengaruh positif, tetapi belum sepenuhnya berhasil diinternalisasikan oleh semua mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan yang lebih sistematis untuk memperkuat integrasi nilai fiqh siyasah dalam seluruh aspek kehidupan akademik dan organisasi mahasiswa.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara

lebih terperinci sejauh mana pemahaman fiqih siyasah berpengaruh terhadap tingkat kesadaran politik mahasiswa. Dengan data kuantitatif, hubungan antara variabel normatif-Islam dan perilaku politik dapat diuji secara lebih empiris. Kedua, penelitian komparatif antar kampus Islam juga penting dilakukan untuk melihat apakah fenomena yang ditemukan di UIN Sunan Kalijaga juga terjadi di perguruan tinggi Islam lainnya, baik negeri maupun swasta. Perbandingan ini akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana konteks institusional, kultural, dan geografis memengaruhi integrasi nilai fiqih siyasah dalam kesadaran politik mahasiswa muslim.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa fiqih siyasah memiliki kontribusi positif terhadap kesadaran politik mahasiswa muslim. Ia berfungsi sebagai kerangka normatif yang memperkuat integritas, idealisme, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan politik mahasiswa. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya studi hubungan Islam dan politik di Indonesia, sementara secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi fiqih siyasah dalam kurikulum kampus dan kegiatan kemahasiswaan. Meski masih ada tantangan berupa apatisme dan pragmatisme, fiqih siyasah tetap memiliki potensi besar untuk membangun generasi mahasiswa muslim yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga beretika dalam berpolitik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amir, F. S. (2024). Tinjauan siyasah dusturiyah tentang fungsi partai politik demokrasi di indonesia. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Demokrasi Di Indonesia*, 5(4), 1–14.
- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Trasparansi dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 64–77.
- Al Farisi, S., Firmansyah, W. A., Zain, D. F. Q., Rijal, K., & Yakin, A. K. (2025). *Perilaku Dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Sebagai Perkembangan Sosial Dalam Pembangunan Politik*. Penerbit: Kramantara JS.
- Arif, M. (2017). *Studi Islam Dalam Dinamika Global*.
- Atmodjo, J. T. (2014). Dinamika partisipasi politik remaja melalui media sosial. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(02), 281–295.
- Azhari, S., & Satibi, I. (2024). *Gagasan Baru Guru Besar: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

- Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024a). Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqh siyasah. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248.
- Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024b). Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqh siyasah. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248.
- GUSMANSYAH, W. (2024). *PERILAKU MONEY POLITIK DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH*.
- Gustam, G. (2024). *Pengaruh Aktivitas Lembaga Kemahasiswaan terhadap Pembentukan Pemahaman dan Kesadaran Politik Mahasiswa STAI DDI Parepare*.
- Hasan, N. (2020). *Dinamika Politik Islam di Indonesia Tahun 2020*.
- Hidayah, N. (2022). *Praktik Politik Dinasti Di Era Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*.
- Islam, G. M. S. (n.d.). *TRANSFORMASI ISLAM POLITIK ERA REFORMASI*.
- Jaya, P. H. I., & Sos, S. (2025). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. *PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR*, 129.
- Mukzizatin, S. (2024). *Inklusivitas Dakwah Islam Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Al-Qur'an*.
- Muzaki, A., Luttadinata, Z., Putri, A. E., Kirana, M. G., Jannah, R. N., Firdaus, M. D., & Rifa'i, M. (2024). Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 7, 35–52.
- Nurjaman, A. (2019). *PARTAI DAN PEMILU Perilaku Politik di Aras Lokal Pasca Orde Baru* (Vol. 1). UMMPress.
- Rachman, F. (2021). *Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam*. IRCiSoD.
- Ramli, R., & Rama, B. (2024). Perkembangan Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 42–54.
- Risman, K. (2022). *Fanatisme Mahasiswa Islam*. Rena cipta mandiri.
- Samsudin, U. (2020). Pendidikan Demokrasi dalam Kurikulum Bermuatan Ideologi pada Institusi Pendidikan Islam. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2(2), 261–277.
- Seriyanti, S., Angelia, I., Juliardi, B., Yusni, Y., Azwar, A., Novita, M. S., Bahtiar, B., & Al Hidayah, A. (2025). *Membumikan Nilai-Nilai Kebangsaan: Integrasi Pancasila*,

Kewarganegaraan, Bahasa dan Agama dalam Pendidikan Tinggi. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

SETIAWAN, H. (2018). *Pemikiran Politik M. Amien Rais Tentang Demokrasi Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*.

Sirait, S., & Faiz, F. (2021). *SOSIALISASI PEMBELAJARAN UIN SUNAN KALIJAGA 2021*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Suryana, C., Haekal, A. H., Islami, A. N., & Ashari, D. (2024). *Politik Inklusif di kehidupan pesantren: Studi naratif Kiyai Muhammad Luthfi Yahya NZ dalam komunikasi politik di era digital*.

Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa*. Guepedia.

Syafuri, H. (2025). *Fiqih siyasah di era globalisasi*.

Syaputra, R. (2019). *HUBUNGAN ANTARA SIKAP TERHADAP PARTAI DAN KOMITMEN ORGANISASI PADA ANGGOTA PARTAI POLITIK DI YOGYAKARTA*.

TOER, P. P. P. A., & MASYKURI, R. (n.d.-a). *JURUSAN SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*.

TOER, P. P. P. A., & MASYKURI, R. (n.d.-b). *JURUSAN SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*.

Ulya, A. A. (2025). *Tindakan Intoleransi Mayoritas Muslim Terhadap Jemaah Masjid Aolia Perspektif Maqāṣid Syarī'ah dan HAM (Studi Kasus di Kecamatan Panggang Gunung Kidul)*.

Wicahyani, S. (2025). *DILEMA MAHASISWA BEM*. Cahya Ghani Recovery.

Wicaksono, Y. P., Hutasoit, T. J., & Sjoifjan, L. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151.